Nama:Tuhfah fadhilah herman

Nim:10200120222

Kelas:HTN F

Partai politik dan pemilihan umum

Dalam pemerintahan yang demokratis, salah satu bentuknya adalah keberadaan partai politik. Partai politik diikuti oleh pemilihan umum untuk pemilihan presiden, wakil presiden dan anggota DPR. Dulu, di awal kemerdekaan, setelah wakil presiden mengumumkan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk membentuk partai politik, rencananya juga akan diadakan pemilihan umum. Namun, karena situasi keamanan dan stabilitas pemerintah tidak memungkinkan, pemilihan umum pertama diadakan hanya 10 tahun setelah kemerdekaan kembali pada tahun 1955.

Sebagai konsekuensi dari munculnya banyak partai politik di negara demokrasi, pemilihan umum diadakan pada tahun 1955 di bawah kepemimpinan Burhanud din Harahap. Selama ini, pemilihan umum diadakan dua kali, yang pertama pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang kedua pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia, pemilihan umum 1955 dikenal sebagai pemilihan umum yang sangat demokratis, adil, jujur, rahasia, dan transparan.

Dalam sistem pemilihan umum, semua jabatan politik, seperti presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, gubernur dan wakilnya, dan jabatan bupati dan wakilnya serta walikota dan wakilnya. Pemilihan umum untuk jabatan-jabatan politik itu ada yang dilakukan serentak ada yang tidak serentak. Di Amerika Serikat pemilihan umum dilakukan serentak bagi jabatan-jabatan politik yang sudah habis masa jabatannya. Dengan demikian pada suatu pemilihan umum jabatan presiden dan wakil habis masa jabatannya bersamaan dengan itu jabatan gubernur di suatu negara bagian juga habis, demikian pula anggota senat dan anggota dewan habis. maka diselenggarakan pemilihan umum serentak bagi jabatan-jabatan tersebut. Sementara ada jabatan-jabatan politik lainnya belum habis maka tidak diadakan pemilihan bagi yang belum habis masa jabatannya. Oleh karena itu di Amerika Serikat setiap tahun ada hari pemilihan (election day) yang ditetapkan pada setiap hari Selasa pertama di bulan September.

Di Indonesia pemilihan umum bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden sendiri sendiri, artinya tidak serentak Baru di tencanakan pada 2019 nanti pemilihan umum serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan daerah.

Setiap warga negara dewasa laki-laki maupun perempuan ber umur 17 tahun atau belum berumur 17 tahun tetapi telah menikah atau pernah menikah, mempunyai hak

memilih dan dipilih. Setiap warga negara baik yang berada di dalam maupun di luar negeri mempunyai hak suara.

BENTUK DAN SISTEM PEMILIHAN UMUM

Ada berbagai jenis sistem pemilu dalam literatur ilmu politik. Dari sekian banyak jenisnya, yang banyak dikenal dan berkisar pada sistem distrik dan sistem proporsional. Sistem daerah pemilihan dikenal juga dengan sebutan daerah pemilihan tunggal, sedangkan sistem proporsional dikenal dengan daerah-daerah pemilihan multi, yang artinya di setiap daerah pemilihan dipilih beberapa wakil.

Sistem distrik adalah sistem tertua yang secara historis didasarkan pada unit geografis yang disebut poviats, yang untuk tujuan pemilihan wilayah negara dibagi menjadi banyak poviats, dan jumlah perwakilan populasi sesuai dengan jumlah poviats. Kandidat dengan suara terbanyak di dapil adalah pemenangnya, sedangkan calon yang kalah dianggap kalah dan tidak dianggap lagi. Setiap sistem memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Sistem ketetangaan memiliki beberapa kelemahan karena sistem ini tidak memperhatikan keberadaan partai-partai kecil dan kelompok minoritas, apalagi kelompok-kelompok tersebut tersebar di beberapa kelurahan. Selain itu, sistem distrik juga bersifat representatif dalam arti calon yang kalah dalam satu daerah pemilihan kehilangan suaranya.

Sistem perwakilan proporsional atau berimbang diadakan dalam rangka menghilangkan atau sekurang-kurangnya mengurangi beberapa kelemahan dalam sistem distrik. Dalam sistem berimbang jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu partai politik sesuai dengan jumlah yang didapatkannya. Untuk mendapatkan jumlah kursi yang diperolehnya ditentukan suatu perbandingan misalnya 1:300.000 yang artinya 300.000 pemilih mempunyai seorang wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam sistem ini negara dianggap menjadi satu daerah pemilihan yang besar, tetapi untuk kepentingan teknis administratif negara dibagi dalam beberapa daerah pemilihan yang biasanya lebih besar dari daerah distrik dalam sistem distrik.

PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM DI AWAL PEMERINTAHAN

Setelah kemerdekaan kita diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada 17 Agustus 1945, dan Undang-Undang 1945 disahkan sehari setelah kemerdekaan, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang merdeka. Berdasarkan undang-undang dasar tersebut Indonesia dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Kekuasaan presiden yang memimpin negara baru ini adalah besar sekali, sehingga banyak tokoh saat itu yang mengkhawatirkan adanya tuduhan dari negara lain bahwa negara kita akan menjadi negara fasis diktator seperti penjajah Jepang yang baru menjajah negara kita saat itu. Itulah sebabnya Sutan Syahrir mengusulkan kepada Wakil Presiden Hatta agar pemerintah mengizinkan rakyat membentuk partai politik.

Pendapat Sutan Syahrir waktu itu diterima oleh wakil presiden maka ditindaklanjuti

dengan mengeluarkan Maklumat X, atau maklumat wakil presiden yang ditandatangani oleh Moh Hatta pada 3 November 1945 yang berisi anjuran tentang pembentukan partai politik. Adanya partai politik itu sekaligus menyatakan bahwa negara yang baru diproklamasikan adalah negara yang mengikuti sistem demokrasi. Karena partai politik merupakan tanda adanya peranan rakyat yang mempunyai kemerdekaan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Dalam maklumat wakil presiden itu digagas pula untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Disebutkan bahwa pemilihan umum itu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Rencananya Pemilu itu diselenggarakan pada Januari 1946. Sayangnya rencana awal Pemilu tidak bisa diselenggarakan karena pemerintah belum siap menata perundang-undangannya dan masih disibukkan oleh masalah keamanan baik di dalam maupun ancaman dari luar.

Pemilihan umum yang pertama kali diselenggarakan adalah 10 tahun setelah kemerdekaan, yakni pada 1955. Pemilihan umum tahun itu amat berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X. Semula yang dipilih dalam Pemilu maklumat adalah anggota DPR dan MPR, akan tetapi dalam Pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama pada 19 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR, dan yang kedua pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Di dalam Maklumat X tidak disebutkan pemilihan anggota Dewan Konstituante.

Keterlambatan menyelenggarakan Pemilu dan terdapatnya "pe nyimpangan itu bukan tanpa sebab. Ada kendala yang disebutkan di atas yang bersumber dari dalam dan ada pula yang berasal dari luar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan Pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Dan tidak kalah pentingnya penyebab dari dalam itu adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran (sirkulasi) kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuasaan asing yang menginginkan negara kita ini terlibat dalam peperangan.

Walaupun mengalami keterlambatan dalam menyelenggarakan Pemilu, namun tidaklah berarti bahwa selama masa konsolidasi kekuatan bangsa dan perjuangan mengusir penjajah itu pemerintah kemudian tidak berniat untuk menyelenggarakan Pemilu. Ada indikasi yang kuat bahwa pemerintah mempunyai keinginan politik untuk menyelenggarakan Pemilu. Misalnya adalah dibentuknya UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang kemudian diubah dengan UU No. 12 Tahun 1949 tentang Pemilu. Di dalam UU No. 12 tahun 1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung). Sifat pemilihan tidak langsung itu didasarkan pada alasan bahwa mayoritas warga negara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf, sehingga kalau pemilihannya langsung dikhawatirkan akan ba

nyak terjadi distorsi.

Kemudian pada paruh kedua tahun 1950. ketika Mohammad Natsir dari Masyumi menjadi perdana menteri, pemerintah memutuskan untuk menjadikan Pemilu sebagai program kabinetnya. Sejak itu pembahasan Undang-Undang Pemilu mulai dilakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Sahardjo dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat. Pada waktu itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Setelah Kabinet Natsir jatuh 6 bulan kemudian, pembahasan Undang-Undang Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman Wirjosandjojo juga dari Masyumi. Pemerintah ketika itu berupaya menyelenggarakan Pemilu karena Pasal 57 UUDS 1950 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Tetapi pemerintah Sukiman juga tidak berhasil menuntaskan pembahasan Undang-Undang Pemilu tersebut. Selanjutnya undang-undang ini baru selesai dibahas oleh parlemen pada masa pemerintahan Wilopo dari PNI pada 1953. Maka lahirlah UU No. 37 tahun 1953 tentang Pemilu. Undang-undang inilah yang menjadi payung hukum Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dengan demikian UU No. 27 Tahun 1953 tentang Pemilu dan yang diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 yang mengadopsi pemilihan bertingkat (tidak langsung) bagi anggota DPR tidak berlaku lagi.

Setelah Kabinet Natsir jatuh 6 bulan kemudian, pembahasan Undang-Undang Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman Wirjosandjojo juga dari Masyumi. Pemerintah ketika itu berupaya menyelenggarakan Pemilu karena Pasal 57 UUDS 1950 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Tetapi pemerintah Sukiman juga tidak berhasil menuntaskan pembahasan Undang-Undang Pemilu tersebut. Selanjutnya undang-undang ini baru selesai dibahas oleh parlemen pada masa pemerintahan Wilopo dari PNI pada 1953. Maka lahirlah UU No. 37 tahun 1953 tentang Pemilu. Undang-undang inilah yang menjadi payung hukum Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dengan demikian UU No. 27 Tahun 1953 tentang Pemilu dan yang diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 yang mengadopsi pemilihan bertingkat (tidak langsung) bagi anggota DPR tidak berlaku lagi.

Perlu dicatat dan dibanggakan bahwa Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur, dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih dari 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan. Adapun yang menarik dari Pemilu 1955 ini adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Oleh karena itu, sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan

Pemilu dengan segala cara. Karena Pemilu kali ini dilakukan untuk dua keperluan, yakni memilih anggota DPR dan memilih anggota Dewan Konstituante maka hasilnya pun perlu dipaparkan semuanya.

Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Konstituante dilakukan pada 15 Desember 1955. Jumlah anggota Konstituante dipilih sebanyak 520 orang, tetapi di Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan. Maka kursi yang dipilih hanya 514. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante menunjukkan hanya PNI, NU, dan PKI meningkat dukungannya, sementara Masyumi meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya merosot 114.267 dibandingkan dengan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR.

PERIODE DEMOKRASI TERPIMPIN

Masa ini adalah masa ketika Presiden Soekarno berkuasa lagi berdasarkan UUD 1945. Sebagaimana kita ketahui dan dijelaskan di depan, UUD ini memberikan kekuasaan yang besar sekali kepada presiden, dan di awal kemerdekaan telah diperingatkan oleh Sutan Syahrir bahwa kekuasaan presiden yang besar itu cenderung menjadikan Indonesia sebagai negara fasis dan diktator. Maka tidak bisa dihindari masa Demokrasi Terpimpin ini kekuasaan besar presiden akan memberikan pengaruh terhadap sistem pemerintahan yang otoriter.

Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun tahun 1958 pejabat Presiden Soekarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II.

Adapun yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan presiden untuk membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945 yang diperkuat dengan Presiden Soekarno menguburkan partai-partai. Dekrit ini kemudian mengakhiri rezim demokrasi dan mengawali otoritarianisme kekuasaan di Indonesia.

Otoritarianisme pemerintahan Soekarno makin jelas ketika pada 4 Juni 1960 ia membubarkan DPR hasil Pemilu 1955. Setelah sebelumnya Dewan Legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak dengan senjata Dekrit 5 Juli 1959 membentuk DPR Gotong Royong (DPR GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden.

Pengangkatan keanggotaan MPR dan DPR dalam arti tanpa pemilihan, memang tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena UUD tidak memuat klausul tentang tata cara memilih anggota DPR dan MPR. Tetapi konsekuensi pengangkatan itu adalah terkooptasinya kedua lembaga itu di bawah kekuasaan presiden. Padahal menurut UUD 1945, MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi selangkan DPR neben atau sejajar dengan presiden.

Sampai Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS melalui Sidang Istimewa pada Maret 1967 (Ketetapan XXXIV/MPRS/1967) setelah meluasnya krisis politik, ekonomi, dan sosial pasca G30S/PKI yang gagal semakin luas. Rezim yang kemudian dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin itu tidak pernah sekalipun menyelenggarakan pemilihan umum. Malahan pada 1963 MPRS yang anggotanya diangkat menetapkan Soekarno, orang yang mengangkatnya, sebagai presiden seumur hidup. Ini adalah satu bentuk kekuasaan otoriter yang mengabaikan kemauan rakyat tersalurkan lewat pemilihan berkala.

PEMILU PERIODIK LIMA TAHUNAN

Setelah jatuhnya kekuasaan pemerintahan Soekarno, Indonesia memasuki era baru. Era pemerintahan ini sering disebut sebagai Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto. Pemilu pertama di zaman Orde Baru atau Pemilu kedua diselenggarakan pada 1971. Selang enam tahun kemudian baru diselenggarakan pemilihan umum yang ketiga pada 1977. Setelah itu pemilihan umum diselenggarakan lima tahunan dan dari sejak itu pula jadwal Pemilu dilaksanakan secara teratur.

Pemilu sejak 1977 terdapat perbedaan dengan Pemilu pemilu sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah pesertanya lebih sedikit, yakni dua parpol dan satu Golkar. Dua parpol itu adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Hal ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Jadi, selama lima kali pemilihan umum, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, pesertanya tiga kekuatan politiknya dua parpol dan satu Golkar.

Hasilnya pun sama Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan PPP dan PDI menjadi pelengkap atau ornamen. Bahkan Golkar sudah menjadi pemenang sejak Pemilu 1971. Keadaan ini secara langsung dan tidak langsung membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar. Pendukung utama Golkar adalah birokrasi sipil dan militer. Berikut ini dipaparkan hasil pemilihan umum tersebut berturut-turut.

1. Hasil Pemilu 1977

Pemungutan suara Pemilu 1977 dilakukan 2 Mei 1977. Cara pembagian kursi masih dilakukan seperti dalam Pemilu 1971, yakni mengikuti sistem proporsional di daerah pemilihan. Dari 70.378.750 pemilih, suara yang sah mencapai 63.998.344 suara atau 90,93 persen. Dari suara yang sah itu Golkar meraih 39.750.096 suara atau 62,11 persen. Namun perolehan kursinya menurun menjadi 232 kursi atau kehilangan 4 kursi dibandingkan Pemilu 1971.

2. Hasil Pemilu 1982

Pemungutan Pemilu 1982 dilakukan secara serentak pada 4 Mei 1982. Pada Pemilu

ini perolehan suara dan kursi Golkar secara nasional meningkat, tetapi gagal merebut kemenangan suara di Aceh. Hanya di Jakarta dan Kalimantan Selatan yang berhasil diambil Golkar dari PPP. Secara nasional Golkar berhasil merebut tambahan 10 kursi dan hal itu berarti kehilangan masing-masing 5 kursi bagi PPP dan PDL Golkar meraih 48.334.724 suara atau 242 kursi. Adapun cara pembagian kursi pada Pemilu 1982 ini tetap mengacu pada ketentuan Pemilu 1971

REFERENSI :

Oleh Prof. Dr. Miftah Thoha, Cetakan ke-1. Oktober 2014, BIROKRASI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA, Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun. Jakarta 13220. penerbit KENCANA